

Perjuangan Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Rusdi Effendi

Pendidikan Sejarah, Universitas Lambung Mangkurat
Email Korespondensi: rusdieffendi@ulm.ac.id

Naskah Diterima: 2 Februari 2025 Naskah Direvisi: 26 Februari 2025 Naskah Disetujui: 1 Maret 2025

ABSTRACT

This research examines the dynamics of the struggle of the Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) in defending independence in Banjarmasin during the 1945 power transition. The problems studied include the ex-political conditions of South Kalimantan during the transition of power from Japan to NICA-Dutch, the strategy and tactics of BPRIK in facing NICA forces, and the impact of the events of November 9, 1945 on the subsequent struggle for independence. The research objective is to analyze the strategic role of BPRIK in maintaining the spirit of independence through armed resistance as required by the political situation at that time. The research method uses historical method through the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography by utilizing primary and secondary sources in the form of official documents, personal records, interview results, and historical literature. The results showed that the complex conditions of the ex-polises with economic collapse, social traumatization, and political uncertainty encouraged the formation of BPRIK as an alternative to armed resistance. BPRIK used an open resistance strategy with frontal attacks during the day to demonstrate legitimacy as freedom fighters, despite tactical defeats. The events of November 9, 1945 had a significant impact by strengthening community solidarity and inspiring continued struggle until South Kalimantan joined the Republic of Indonesia in 1950.

Keywords: BPRIK, independence struggle, Banjarmasin, NICA, national revolution

PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamlirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta merupakan momentum bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dari belenggu penjajahan, di mana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kalah terhadap Sekutu. Tindak lanjut proklamasi kemerdekaan tersebut adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, menunjuk Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan pembagian wilayah negara atas beberapa provinsi. Salah satu provinsi yang ditetapkan dalam pembagian wilayah negara adalah Kalimantan dengan gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor. Berita gembira atas kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut seharusnya disambut riang gembira oleh rakyat di Banjarmasin dan seluruh rakyat di Kalimantan, mengingat penderitaan yang dialami selama masa penjajahan sebelumnya (Saleh, 1984; Al Rifany et al., 2024).

Namun, berita kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan dan kota Banjarmasin tidaklah sepenuhnya tersebar kepada warga masyarakat saat itu. Hanya sebagian kecil yang mendengar berita tersebut, misalnya siaran radio terbatas pada kaum buruh yang bekerja di kantor Domei dapat ditangkap melalui radio gelap di daerah Kandangan dan Banjarmasin. Dari kedua tempat tersebut lambat laun tersebarlah lebih luas ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Di Kandangan berita proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945 dimuat dalam surat kabar “Borneo Simbun” edisi Hulu Sungai yang dipimpin oleh H. A. Basuni. Namun Pemerintah Jepang mendapat perintah mempertahankan

status quo dengan mengambil tindakan melarang peredaran surat kabar yang terbit pada hari itu, sehingga upaya penyebaran berita kemerdekaan menghadapi hambatan yang signifikan (Leirissa et.al, 1984; Syaharuddin, 2014).

Kompleksitas situasi semakin bertambah dengan kedatangan tentara Australia yang mewakili Sekutu di Banjarmasin pada tanggal 17 September 1945. Rombongan tentara Australia dipimpin Kolonel Rabson atas nama Sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Pemerintah Pendudukan Jepang. Bersama rombongan tentara Australia tersebut ikut membongkar tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di bawah pimpinan Mayor A.L. van Assenderp yang semuanya berjumlah 160 orang. Jumlah orang-orang NICA kemudian bertambah 70 orang, mereka berasal dari KNIL yang sebelumnya dipenjarakan Jepang atau sudah kembali ke masyarakat. Kehadiran NICA ini menimbulkan permasalahan baru bagi perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan karena mereka berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda (Budhigawis, 1989).

Pihak Sekutu yang diwakili Panglima Tentara Australia Jenderal Sir Thomas Albert Blamey telah menyerahkan kekuasaan kepada Pimpinan NICA untuk mengurus wilayah administrasi pemerintahan di wilayah Timor, Sulawesi, Manado, Borneo (Kalimantan), Keresidenan Ambon, Pulau Kei, Aru dan Tanibar, serta Nieuw Guinea. Sebenarnya pengumuman itu sudah disiarkan tanggal 1 Oktober 1945 khususnya di Banjarmasin dan daerah Kalimantan Selatan, namun pengumuman tersebut sengaja dimundurkan oleh pihak NICA. NICA melakukan strategi penundaan sambil menyusun kekuatan baru dan melihat gejala-gejala dari tokoh-tokoh pergerakan, partai politik, dan kalangan pemuda pejuang di Banjarmasin dan daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Dengan Surat Mandat pelimpahan kekuasaan dari Sekutu kepada NICA, hal ini merupakan dasar payung hukum yang paling kuat bagi NICA untuk membuka kesempatan kembali pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan (Madar et.al, 1984).

Situasi tersebut memunculkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di kalangan pemuda dan tokoh pergerakan. Peristiwa 10 Oktober 1945 menjadi titik kulminasi kekecewaan rakyat ketika rencana pawai besar merah-putih, pengibaran bendera merah-putih, penyanyian lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dan penurunan bendera Belanda dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi akibat larangan dari pihak NICA-Belanda yang dibantu tentara Australia, dengan ancaman akan menembak siapa saja yang mencoba menurunkan bendera Belanda. Peristiwa ini semakin menimbulkan kebencian rakyat, khususnya para pemuda pelopor perjuangan di Banjarmasin, hal yang sama terjadi juga di Amuntai, Barabai, Rantau dan Kandangan, Martapura dan beberapa kota lainnya di Kalimantan Selatan. Kebencian ini kemudian mengakibatkan terjadinya bentrokan-bentrokan dan insiden berdarah di berbagai tempat, seperti penganiayaan serdadu NICA di Pasar Meng Seng Banjarmasin dan penikaman polisi NICA di Barabai (Noor, 1989).

Kebencian dan kekecewaan tersebut memunculkan berbagai organisasi perjuangan yang menentang kehadiran NICA-Belanda. Melihat tidak adanya kemungkinan penyelesaian melalui jalur diplomasi, para tokoh dan pemuda pejuang mulai mempertimbangkan perlawanan bersenjata sebagai alternatif terakhir. Pada tanggal 16 Oktober 1945, di Banjarmasin, secara rahasia atas kesadaran yang tinggi dan kebencian terhadap NICA-Belanda, para pemuda pelopor perjuangan membentuk sebuah wadah perjuangan baru dengan nama BPRIK (Barisan

Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan). Organisasi ini dipimpin oleh M. Amin Effendy, Abdul Kadir Uwan dan kawan-kawan lainnya, dengan anggota utama para pemuda khususnya bekas Heiho yang telah mendapat pendidikan militer pada masa pendudukan Jepang. BPRIK dengan cepat tersebar dan terbentuk di kawasan Hulu Sungai serta daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan (Madar et.al, 1984).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana dinamika perjuangan BPRIK dalam mempertahankan kemerdekaan di Banjarmasin pada masa transisi kekuasaan 1945. Permasalahan tersebut muncul dari asumsi penulis bahwa BPRIK memiliki peran strategis dalam mempertahankan semangat kemerdekaan di Kalimantan Selatan melalui perlawanan bersenjata yang dipersyaratkan situasi politik saat itu. Permasalahan pokok di atas dijawab melalui beberapa pertanyaan penelitian berikut ini, Pertama, bagaimana kondisi eksosopol (ekonomi-sosial-politik) Kalimantan Selatan saat dilanda transisi kekuasaan dari Jepang ke NICA-Belanda pada 1945? Kedua, bagaimana strategi dan taktik BPRIK dalam menghadapi kekuatan NICA-Belanda di Banjarmasin? Ketiga, bagaimana dampak peristiwa 9 November 1945 terhadap perkembangan perjuangan kemerdekaan selanjutnya di Kalimantan Selatan? Tulisan ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada dinamika perjuangan BPRIK dan peristiwa 9 November 1945 sebagai dua variabel yang akan dihubungkan dalam pembahasan. Cakupan temporal tulisan ini yakni terfokus pada tahun 1945 untuk melihat setiap detail peristiwa yang terjadi antara masa transisi kekuasaan Jepang, kedatangan Sekutu yang membongkang NICA, hingga perlawanan bersenjata BPRIK di Banjarmasin.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji dinamika perjuangan BPRIK dalam mempertahankan kemerdekaan di Banjarmasin pada tahun 1945. Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang dilaksanakan secara berurutan untuk memperoleh narasi sejarah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kuntowijoyo, 2005).

Tahap heuristik dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah, catatan-catatan pribadi para pelaku sejarah, dan hasil wawancara dengan saksi mata peristiwa seperti yang dilakukan dengan A.A. Hamidhan sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari utusan daerah Kalimantan Selatan. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka di perpustakaan, arsip nasional, museum, dan lembaga-lembaga penyimpanan dokumen sejarah. Selain sumber tertulis, penelitian ini juga memanfaatkan sumber lisan berupa kesaksian para veteran pejuang dan keluarga tokoh-tokoh BPRIK, serta sumber benda berupa foto-foto, monument, dan artefak yang berkaitan dengan peristiwa 9 November 1945.

Tahap kritik dilakukan untuk memverifikasi keabsahan dan kredibilitas data yang telah dikumpulkan melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengecek keaslian dokumen, identitas pengarang, waktu penulisan, dan kondisi fisik sumber

untuk memastikan otentisitas sumber yang digunakan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang membahas peristiwa yang sama untuk mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi informasi. Kritik internal dilakukan dengan menganalisis isi sumber untuk menilai kredibilitas dan objektivitas penulis, serta mengidentifikasi kemungkinan bias atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi penulisan. Proses verifikasi juga melibatkan *cross-check* antara sumber tertulis dengan sumber lisan untuk memperoleh konfirmasi fakta-fakta yang disajikan. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap kapasitas dan posisi saksi mata atau penulis sumber dalam kaitannya dengan peristiwa yang diceritakan untuk menentukan tingkat kepercayaan informasi yang diberikan.

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data yang telah diverifikasi untuk memahami makna dan keterkaitan antar fakta sejarah yang diperoleh. Proses interpretasi melibatkan analisis sebab-akibat untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya BPRIK dan terjadinya peristiwa 9 November 1945. Data yang telah terkumpul dianalisis dalam konteks situasi politik, ekonomi, dan sosial Kalimantan Selatan pada masa transisi kekuasaan 1945 untuk memahami dinamika perjuangan kemerdekaan di daerah tersebut. Interpretasi juga dilakukan dengan membandingkan peristiwa di Banjarmasin dengan perjuangan kemerdekaan di daerah lain untuk memahami keunikan dan kesamaan pola perjuangan. Proses penafsiran data disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu dinamika perjuangan BPRIK, dengan memperhatikan aspek kronologis peristiwa, motivasi para pelaku, strategi dan taktik yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk menghasilkan interpretasi yang objektif dan berimbang.

Tahap historiografi dilakukan dengan menulis narasi sejarah berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Penulisan sejarah dilakukan secara kronologis dengan memperhatikan urutan waktu peristiwa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan situasi dari masa ke masa. Narasi disusun dengan mengintegrasikan berbagai sumber dan perspektif untuk menghasilkan cerita sejarah yang komprehensif dan berimbang. Penulisan dilakukan dengan gaya bahasa akademis yang objektif, menghindari penilaian subjektif, dan memberikan ruang bagi pembaca untuk menarik kesimpulan sendiri. Struktur penulisan disusun secara sistematis mulai dari latar belakang, perkembangan peristiwa, hingga dampak yang ditimbulkan. Dalam proses penulisan, penulis berusaha menghindari bias dan kepentingan tertentu dengan menyajikan fakta-fakta sejarah secara apa adanya. Setiap pernyataan dan argumen yang dikemukakan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dari sumber-sumber yang telah diverifikasi, dan dilengkapi dengan sistem rujukan yang jelas untuk memudahkan penelusuran kembali sumber-sumber yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksosopol Kalimantan Selatan Masa Transisi Kekuasaan 1945

Kondisi ekonomi-sosial-politik (eksosopol) Kalimantan Selatan pada masa transisi kekuasaan dari Jepang ke NICA-Belanda tahun 1945 menunjukkan kompleksitas yang tinggi dan ketidakpastian yang mempengaruhi dinamika perjuangan kemerdekaan di daerah tersebut. Dari aspek ekonomi, Kalimantan Selatan mengalami kehancuran akibat politik bumi hangus yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda menjelang kedatangan tentara Jepang pada

Februari 1942, di mana berbagai fasilitas strategis seperti Pasar Baru, Fort Tatas, Jembatan Coen, pelabuhan, gudang-gudang, dan pabrik listrik Aniemi mengalami kerusakan parah (Saleh, 1975:61). Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja paksa (romusha) selama masa pendudukan Jepang, yang mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat. Sektor perdagangan mengalami stagnasi karena sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang, sementara sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas akibat mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan perang. Ketika NICA tiba pada September 1945, kondisi ekonomi Kalimantan Selatan masih dalam proses pemulihan, namun kehadiran mereka justru menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem eksploitasi kolonial yang pernah ada sebelumnya.

Dari aspek sosial, masyarakat Kalimantan Selatan mengalami traumatisasi akibat kekejaman yang dilakukan tentara pendudukan Jepang, termasuk eksekusi massal, pemancungan dengan pedang Jepang, dan pembantaian di “Sungai Pembunuhan” yang menjadi saksi bisu kekerasan tersebut. Struktur sosial tradisional mengalami guncangan karena sistem pemerintahan militer Jepang yang otoriter, di mana para pemimpin lokal dipaksa bekerja sama atau menghadapi konsekuensi yang fatal. Generasi muda yang tergabung dalam organisasi militer bentukan Jepang seperti Heiho, Kaigun Heiho, dan Bo Ei Tai Sin Tai memperoleh pendidikan militer yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, trauma perang dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pendudukan menciptakan atmosfer ketakutan dan kewaspadaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Ketika berita kemerdekaan Indonesia mulai tersebar, muncul harapan baru namun juga keraguan karena pengalaman pahit masa lalu, sehingga respons masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan bervariasi antara antusias, skeptis, dan takut (Saleh et.al, 1986).

Kondisi politik menunjukkan situasi yang sangat rumit dengan adanya transisi kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu yang kemudian diserahkan kepada NICA. Pemerintah Jepang yang sudah menyerah pada 15 Agustus 1945 masih mempertahankan status quo di Kalimantan Selatan sambil menunggu kedatangan tentara Sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan yang menciptakan ketidakpastian politik. Kedatangan tentara Australia pada 17 September 1945 yang membonceng NICA menimbulkan kecurigaan dan penolakan dari kalangan tokoh pergerakan dan pemuda, karena dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Pembentukan organisasi politik seperti PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) pada 16 Agustus 1945 atas anjuran Jepang, serta kemunculan Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Kalimantan Selatan menunjukkan adanya upaya untuk mengisi kekosongan politik dan menyalurkan aspirasi kemerdekaan. Namun, upaya-upaya politik damai ini mengalami hambatan dengan adanya tekanan dari NICA yang berusaha mengkooptasi tokoh-tokoh lokal seperti Pangeran Musa Ardikesuma yang akhirnya berpihak kepada NICA sebagai Kiai Besar, sehingga jalur diplomasi dan politik legal menjadi semakin sempit (Leirissa et.al, 1984).

Strategi dan Taktik BPRIK dalam Menghadapi NICA-Belanda

Pembentukan BPRIK pada 16 Oktober 1945 merupakan respons strategis terhadap kegagalan jalur diplomasi dan semakin tertutupnya ruang politik legal bagi perjuangan kemerdekaan di Banjarmasin. BPRIK yang dipimpin oleh M. Amin Effendy, Abdul Kadir Uwan, dan tokoh-tokoh lainnya mengadopsi strategi perlawanan bersenjata dengan

memanfaatkan kekuatan para pemuda bekas Heiho yang telah memiliki dasar-dasar pendidikan militer. Organisasi ini menggunakan struktur semi-militer dengan pembagian tugas yang jelas, di mana M. Amin Effendy bertindak sebagai pimpinan umum, sementara Abdul Kadir Uwan dan Mas Untung Sabri memimpin kelompok-kelompok operasional. Strategi utama BPRIK adalah melakukan perlawanan terbuka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan perampok seperti yang dituduhkan NICA, melainkan pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih heroik dan mampu membangkitkan semangat perlawanan yang lebih luas di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan (Madar et.al, 1984).

Taktik operasional BPRIK menunjukkan kombinasi antara pendekatan konvensional dan gerilya, meskipun cenderung lebih banyak menggunakan serangan frontal. Persiapan penyerangan 9 November 1945 dilakukan melalui beberapa tahapan strategis, pertama melakukan pendekatan kepada polisi NICA berkebangsaan Indonesia yang dianggap simpati terhadap perjuangan kemerdekaan, kedua mengajak partisipasi masyarakat luas terutama orang-orang Cintapuri yang memiliki sejarah perlawanan terhadap Belanda, ketiga memberikan "ilmu kekebalan" kepada para pejuang untuk meningkatkan moral dan keyakinan, dan keempat mengatur strategi penyerangan dengan pembagian kekuatan dalam tiga kelompok. Kelompok sayap tengah dipimpin M. Amin Effendy dengan 300 orang bertugas menyerang kantor polisi NICA di Jalan Jawa, kelompok sayap kiri dipimpin Mas Untung Sabri dengan 1.110 orang, dan kelompok sayap kanan dipimpin Panglima Halid Tafsir dengan 90 orang yang bertugas menyerang Kompi X di Kelayan. Strategi penyerangan siang hari dipilih untuk menunjukkan keberanian dan membedakan antara tentara NICA dengan tentara Australia, meskipun hal ini juga meningkatkan risiko korban (Madar et al., 1984).

Kelemahan taktik BPRIK terlihat dari kurangnya koordinasi yang efektif antara kelompok, minimnya persenjataan modern dibandingkan dengan lawan, dan bocornya rencana operasi kepada mata-mata NICA yang menyusup dalam organisasi. Kegagalan penyerangan 1-2 November 1945 yang seharusnya menjadi momen perampasan senjata untuk memperkuat persenjataan BPRIK, justru memberikan peringatan kepada NICA untuk memperkuat pertahanan mereka. Meskipun demikian, BPRIK menunjukkan kemampuan adaptasi dengan memindahkan markas dari Pasar Lama ke Pangambangan untuk menghindari serangan balasan dan melindungi warga sipil. Taktik psikologis juga digunakan dengan melakukan serangan di Pasar Baru pada 1 November 1945 sebagai tampilan awal untuk menguji nyali pasukan dan menambah semangat anggota. Namun, ketergantungan pada "ilmu kekebalan" dan keyakinan spiritual menunjukkan kurangnya persiapan teknis militer yang memadai, sehingga ketika menghadapi senjata modern NICA seperti panzer dan senjata otomatis, perlawanan BPRIK menjadi tidak efektif dan mengakibatkan korban yang cukup besar (Basry, 2003).

Dinamika Pertempuran 9 November 1945 dan Akibatnya

Pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin berlangsung dari pukul 16.30 hingga 18.30 WITA dengan intensitas yang cukup tinggi, menunjukkan determinasi dan keberanian para pejuang BPRIK dalam menghadapi kekuatan NICA-Belanda yang lebih superior secara persenjataan. Serangan dimulai ketika kelompok sayap tengah di bawah komando M. Amin Effendy berhasil mendekati kantor polisi NICA di Jalan Jawa tanpa perlawanan berarti pada awal serangan. Namun, situasi berubah drastis ketika dari kantor polisi mulai keluar tembakan-

tembakkan intensif terhadap para penyerang, dan NICA mengerahkan panser-panser sambil menembak secara membabi buta. Pertahanan NICA yang sangat kuat memaksa pasukan BPRIK untuk mengubah strategi dengan merembes ke Markas Belanda Kompi Betet dan terus menyerang Kompi X di Kelayan yang dipertahankan oleh 150 tentara NICA. Kelompok sayap kiri yang dipimpin Mas Untung menghadapi pertahanan Belanda yang dijaga 250 orang, sementara kelompok sayap kanan pimpinan Panglima Halid Tafsiar juga bergerak menuju Kompi X, sehingga ketiga kelompok pasukan tersudut dan terkumpul di satu lokasi yang mempermudah serangan balasan NICA (Madar et al., 1984).

Hasil pertempuran menunjukkan kekalahan taktis BPRIK dengan jatuhnya sembilan korban jiwa yang kemudian dikenang sebagai kusuma bangsa, yaitu Badran, Badrun, Utuh, Umar, Ta'in, Juma'in, Sepa, Dulah dan Pak Ma'rupi. M. Amin Effendy sebagai pimpinan mendapat luka akibat tembakan dan kemudian ditangkap, demikian pula Panglima Halid Tafsiar yang tertangkap saat memimpin kelompok sayap kanan. Ketika hari mulai gelap, sebagian besar anggota BPRIK mulai meninggalkan pertempuran dan menyebar untuk menyelamatkan diri, menunjukkan bahwa organisasi ini belum memiliki disiplin militer yang kuat untuk mempertahankan posisi dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun mengalami kekalahan, pertempuran ini berhasil menunjukkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan pihak NICA bahwa semangat perlawanan terhadap upaya restorasi kolonial masih sangat kuat. Keberanian melakukan penyerangan di siang hari bolong juga membuktikan bahwa BPRIK bukanlah gerombolan perampok seperti yang dituduhkan NICA, melainkan organisasi perjuangan yang memiliki tujuan politik yang jelas yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Serangan balasan NICA pada 12-13 November 1945 terhadap Markas Besar BPRIK di Pangambangan menggunakan kapal Kelua menunjukkan keseriusan mereka dalam menumpas gerakan perlawanan. Meskipun kelompok pejuang sudah sempat menyembunyikan diri, NICA melakukan penangkapan massal terhadap penduduk yang dicurigai di Pangambangan dan sekitarnya. Para pemimpin BPRIK sebagian berhasil melarikan diri ke daerah Hulu Sungai dan daerah lainnya untuk melanjutkan perlawanan, sementara sebagian lainnya tertangkap dan dipenjarakan. Perpecahan dalam kepemimpinan BPRIK setelah peristiwa ini terlihat dari hanya tersisanya satu kelompok utuh di bawah pimpinan Amat Bunjamin (Bunjamin Amey) yang berevakuasi dari Pangambangan menuju Pulang Pisau. Meskipun organisasi BPRIK secara formal mengalami kehancuran, semangat perlawanan yang ditunjukkan dalam peristiwa 9 November 1945 menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan perjuangan selanjutnya dan membuktikan bahwa rakyat Kalimantan Selatan tidak akan menerima begitu saja upaya restorasi kekuasaan kolonial Belanda.

Dampak Peristiwa 9 November 1945 terhadap Perjuangan Kemerdekaan

Peristiwa 9 November 1945 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun secara taktis mengalami kekalahan. Dampak psikologis yang paling menonjol adalah bangkitnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan bahwa perjuangan kemerdekaan memerlukan pengorbanan yang besar dan tidak dapat dicapai melalui jalur diplomasi semata. Keberanian sembilan pejuang yang gugur dalam pertempuran menjadi simbol pengorbanan yang menginspirasi generasi pejuang selanjutnya, sebagaimana

terbukti dengan didirikannya tugu peringatan di Jalan D.I. Panjaitan (dahulu Jalan Jawa) dan Tugu 9 November di desa Pangambangan sebagai penghormatan kepada para syuhada. Dampak simbolis ini sangat penting dalam membangun narasi heroisme lokal yang memperkuat identitas kedaerahan dalam konteks perjuangan nasional, menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya terpusat di Jawa tetapi juga menyebar ke seluruh Nusantara dengan karakteristik perjuangan yang unik sesuai kondisi lokal masing-masing daerah.

Dalam jangka pendek, peristiwa ini mengakibatkan represi yang lebih ketat dari NICA terhadap gerakan-gerakan perlawanan di Kalimantan Selatan, dengan dilakukannya penangkapan massal, penggeledahan rumah-rumah, dan pembatasan pergerakan masyarakat. Namun, represi ini justru memperkuat solidaritas di antara para pejuang dan memperluas basis dukungan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Para pemimpin BPRIK yang berhasil meloloskan diri kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi perjuangan lainnya seperti ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan, yang kemudian memainkan peran penting dalam revolusi fisik 1945-1949. Pengalaman pertempuran 9 November 1945 juga menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya koordinasi, intelijen, dan strategi gerilya yang lebih efektif dalam menghadapi kekuatan kolonial yang superior. Hal ini terbukti dari perkembangan taktik perjuangan selanjutnya yang lebih mengedepankan perang gerilya dan sabotase dibandingkan dengan serangan frontal seperti yang dilakukan BPRIK.

Dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah terbentuknya momentum perjuangan yang berkelanjutan hingga tercapainya gencatan senjata pada 2 September 1949 antara ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan dengan pihak Belanda. Peristiwa 9 November 1945 menjadi "cambuk pembangun semangat perjuangan" yang menginspirasi berbagai aksi perlawanan selanjutnya, termasuk perjuangan ALRI DIVISI IV/A yang dipimpin H. Hassan Basry dan kawan-kawan. Kontinuitas perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 29 Desember 1949, dan bergabungnya Kalimantan Selatan dengan Republik Indonesia pada 1 Mei 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137, 138, 139, dan 140 tanggal 4 April 1950. Dari perspektif historiografi nasional, peristiwa 9 November 1945 memperkaya narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya termanifestasi dalam peristiwa-peristiwa besar di Jawa, tetapi juga dalam perjuangan-perjuangan heroik di daerah yang mungkin kurang dikenal tetapi memiliki makna yang sama pentingnya dalam proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (Handy et al., 2022; Sari et al., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika perjuangan BPRIK dalam mempertahankan kemerdekaan di Banjarmasin pada masa transisi kekuasaan 1945, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjawab tujuan penelitian ini. Kondisi eksosopol (ekonomi-sosial-politik) Kalimantan Selatan pada masa transisi kekuasaan dari Jepang ke NICA-Belanda tahun 1945 menunjukkan kompleksitas yang tinggi dengan adanya kehancuran ekonomi akibat politik bumi hangus Belanda dan eksploitasi Jepang, traumatisasi sosial akibat kekejaman pendudukan, serta ketidakpastian politik yang tercipta dari transisi kekuasaan dan kehadiran NICA yang berupaya mengembalikan sistem kolonial. Kondisi ini menciptakan

ruang politik yang semakin sempit bagi perjuangan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, sehingga mendorong munculnya alternatif perlawanan bersenjata. Strategi dan taktik BPRIK dalam menghadapi kekuatan NICA-Belanda menunjukkan kombinasi pendekatan konvensional dan psikologis dengan memanfaatkan kekuatan para pemuda bekas Heiho, mengadopsi strategi perlawanan terbuka melalui serangan frontal di siang hari untuk menunjukkan legitimasi mereka sebagai pejuang kemerdekaan, meskipun terdapat kelemahan dalam hal koordinasi, persenjataan, dan keamanan operasional yang menyebabkan kegagalan taktis.

Dampak peristiwa 9 November 1945 terhadap perkembangan perjuangan kemerdekaan selanjutnya di Kalimantan Selatan sangat signifikan, meskipun secara taktis mengalami kekalahan dengan gugurnya sembilan pejuang sebagai kusuma bangsa. Dalam jangka pendek, peristiwa ini memicu represi yang lebih ketat dari NICA namun justru memperkuat solidaritas dan memperluas basis dukungan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, sementara dalam jangka panjang menjadi momentum pembangkit semangat yang menginspirasi perjuangan berkelanjutan hingga terbentuknya ALRI Divisi IV/A Pertahanan Kalimantan dan tercapainya gencatan senjata pada 1949 serta bergabungnya Kalimantan Selatan dengan Republik Indonesia pada 1950. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa perjuangan BPRIK dan peristiwa 9 November 1945 memiliki peran strategis dalam mempertahankan semangat kemerdekaan di Kalimantan Selatan melalui perlawanan bersenjata yang dipersyaratkan oleh situasi politik saat itu. Meskipun mengalami kekalahan taktis, perjuangan ini berhasil menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya terpusat di Jawa tetapi juga tersebar ke seluruh Nusantara dengan karakteristik dan dinamika yang unik sesuai kondisi lokal masing-masing daerah, sehingga peristiwa heroik 9 November 1945 memperkaya khazanah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi bagian integral dari proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Al Rifani, A. N., Syaharuddin, S., & Nadilla, D. F. (2024). IMPLEMENTASI NILAI NASIONALISME PERJUANGAN BRIGJEND HASSAN BASRY DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KELAS XII DI SMAN 2 BANJARMASIN. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 9(2), 90-104.
- Basry, H. H. (2003). *Kisah gerilya Kalimantan, periode 1945-1949* (Jilid 1 & 2). Yayasan Bhakti Banua.
- Budhigawis, H. A. H. (1989). *Menelusuri jejak-jejak revolusi di Kalimantan Selatan*. Penerbit tidak disebutkan.
- Gafuri, H. A. (1984). *Sejarah perjuangan gerilya menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan*. Kantor Penerangan Kabupaten Tapin.
- Handy, M. R. N., Sari, D. N., Syaharuddin, S., Putra, M. A. H., & Putro, H. P. N. (2022). Penguatan nilai nasionalisme dalam sejarah perjuangan alri divisi iv kalimantan selatan sebagai sumber belajar ips. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 8(1), 37-46.
- Kuntowijoyo, K (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Leirissa, R. Z., Nawawi, R., Ruslan, T., & Kartadarmadja, M. S. (1984). *Sejarah sosial daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

- Madar, H. A. S., Gafuri, H. A., Asnawi, A., Ketaren, E., Koroh, A. A., Yustian, D., & Johansyah. (1984). *Sejarah perjuangan rakyat menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (periode 1945-1949)*. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- Nawawi, H. R. (1979). *Sejarah revolusi kemerdekaan (1945-1949) daerah Kalimantan Selatan*. Proyek IDKID, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noor, Y. (1989). *Peranan sektor 01/2 17 MD perjuangan ALRI Divisi IV (A) pertahanan Kalimantan dalam perjuangan gerilya di Tapin Kalimantan Selatan* [Tesis sarjana, FKIP Unlam]. Repository FKIP Unlam.
- Saleh, M. I. (1975). *Banjarmasin, sejarah singkat mengenai bangkit dan berkembangnya kota Banjarmasin serta wilayah sekitarnya sampai tahun 1950*. Almamater Offset.
- Saleh, M. I. (1984). *Sejarah daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saleh, M. I., Jamal, B., Koroh, A. A., Yustian, D., & Johansyah. (1986). *Sejarah daerah tematis zaman kebangkitan nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sari, D. N., Syaharuddin, S., Handy, M. R. N., Rajiani, I., & Subiyakto, B. (2022). The Spirit of Nationalism of the Banjar People on the Proclamation of 17th May 1949. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 4(1), 9-17.
- Syahrudin, S. (2016). *Transformasi Nilai-Nilai Toleransi Urang Banjar Periode Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan (1945-1949)*. Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.